

# Dwitunggal untuk Yogyakarta

Oleh: Hendra Kurniawan



JUMENENGAN Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KG-PAA) Paku Alam X akhirnya digelar pada 7 Januari 2016. Peristiwa ini bakal menjadi catatan sejarah penting khususnya bagi eksistensi Kadipaten Pakualaman. Menilik sejarahnya, Kadipaten Pakualaman boleh disebut sebagai "adik" dari Kasultanan Yogyakarta. Pola serupa terjadi pula antara Kasunanan Surakarta dengan Kadipaten Mangkunegaran. Relasi satu sama lain begitu unik dan menggoreskan sejarah tersendiri sebagai keturunan trah Mataram.

Awal terbentuknya Kadipaten Pakualaman tidak lepas dari upaya pecah belah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan tentu saja dimulai dengan bibit-bibit konflik. Gesekan yang terjadi dalam internal keraton ditunggangi oleh pemerintah kolonial yang seolah-olah hendak membantu penyelesaian konflik namun berujung pada lahirnya kekuasaan baru. Menariknya pasca entitas kekuasaan masing-masing terbentuk, mereka hidup berdampingan dan saling mendukung. Sejarah belum pernah mencatat terjadinya konflik terbuka yang terjadi secara frontal satu sama lain.

Berdirinya Kadipaten Pakualaman ditandai dengan ditandatangani kontrak politik antara Pangeran Notokusumo dengan Residen Yogyakarta, John Crawford pada tanggal 17 Maret 1813. Pangeran Notokusumo adalah putera dari Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) I yang berjasa dalam memberi dukungan atas naiknya Pangeran Surojo sebagai Sri Sultan HB III. Atas jasanya itu Pangeran Notokusumo berhak atas 4.000 cacah tanah yang meliputi wilayah di sebelah timur Kasultanan Yogyakarta dan Kabupaten Adikarto. Pangeran Notokusumo juga diperkenankan memiliki 100 orang prajurit dan membangun istananya di dekat Keraton Yogyakarta. Beliau berhak menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I.

Paku Alam menjadi Pangeran Amardika (pangeran yang merde-

ka), meskipun demikian Kadipaten Pakualaman tetap memiliki kewajiban tertentu di bawah Kasultanan Yogyakarta. Hak atas cacah berarti hak penuh atas tanah dan seluruh isinya termasuk rakyat yang berdiam di wilayah tersebut. Ini menjadi penanda utama bagi status otonomi Kadipaten Pakualaman. Dengan demikian Kadipaten Pakualaman juga memiliki kawula dan Paku Alam yang bertahta menjadi raja kecil yang memimpin atas mereka. Adanya relasi kawula-raja ini membuat suksesi kepemimpinan dalam keraton bukanlah barang gampang (nggampangke).

## Tahta untuk rakyat

Raja adalah seorang pinilih yang mendapatkan supremasi bukan hanya dari rakyat namun kekuasaan yang diperolehnya lebih dibangun dari legitimasi transendental. Kenyataan seperti ini dalam era demokrasi terkadang menjadi sulit dipahami dengan nalar modernitas. Gung binanthara, mbaudenda anyakrawati, ambeg adil paramarta. Konsep Jawa ini menempatkan raja sebagai pemilik kekuasaan mutlak laksana dewa yang memegang

hukum tertinggi dan memiliki kebijaksanaan besar. Untuk itu seorang raja harus sungguh rembesing madu, wijiling atapa, lan tedhaking andhana warih. Raja adalah seorang dari trah bangsawan yang senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan dan memperoleh wahyu sebagai raja.

Konsep ini tampak begitu lekat dan dipahami dengan baik oleh KBPH Suryodilogo. Terbukti beliau melakukan laku poso atau ritual puasa untuk menata hati dan keselamatan menjelang penobatannya sebagai Paku Alam X. Istilah poso berasal dari Bahasa Sansekerta yakni upa dan wasa. Upa berarti pertalian dan wasa berarti wewenang atau kekuasaan. Oleh karena itu, berpuasa merupakan bagian dari lelaku untuk mendapatkan ilmu, berkah, maupun wahyu dari Sang Kuasa. Berpuasa menjadi syarat mutlak yang tidak boleh ditinggalkan.

Berangkat dari awal yang baik inilah tentu semua pihak utamanya masyarakat ingin agar Paku Alam X menjadi pemimpin yang berpihak pada rakyat. Bercermin dari pendahulunya,

Paku Alam IX, yang begitu dekat dengan masyarakat maka tentu gaya yang sama juga diharapkan muncul dalam diri Paku Alam X. Perubahan gaya feodal seorang raja menjadi begitu egaliter tentu tidak lepas dari perubahan zaman. Sebuah ciri keistimewaan yang dapat diusung di era demokrasi sekarang ini.

Titik perubahan paradigma ini begitu kentara setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 diproklamasikan. Didorong semangat nasionalisme yang tinggi, ketika itu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sepakat untuk member dukungan. Tanggal 19 Agustus 1945 Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengirimkan telegram berisi ucapan selamat atas kemerdekaan dan terpilihnya Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bahkan selanjutnya tanggal September 1945, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai daerah istimewa. Sejak itu diangkatlah Sri Sultan HB IX sebagai Gubernur dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepemimpinan keduanya memberikan teladan yang menjadi energi positif bagi perpolitikan nasional saat itu.

Erat dan kompaknya kepemimpinan bersama antara orang nomor 1 dan 2 di Yogyakarta terus berlanjut. Meskipun silih berganti, mulai dari Sri Sultan HB IX hingga X dan Paku Alam VIII hingga IX kerja sama itu terus terbangun erat. Selama ini mereka saling mendukung dan menopang satu sama lain. Kini saatnya dwitunggal baru untuk Yogyakarta yakni pasangan Sri Sultan HB X dan Paku Alam X siap diuji. Semua tentu berharap mereka berdua dapat mengayomi dan menyejahterakan masyarakat Yogyakarta seluruhnya. Semoga kedua tokoh ini sungguh dapat menjadi dwitunggal yang tulus mempersembahkan tahtanya untuk rakyat. \*\*\*

**Hendra Kurniawan MPd**

Dosen Pendidikan Sejarah FKL  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta

